

Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022

Auliyah Rahma Febri Yana¹, Humaerah Mathar², Irsyad Dhahri³^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar¹Auliyah.rahma16@gmail.com, ²stmerahmathar@gmail.com, ³irsyad.dhahri@unm.ac.id**Abstrak**

Youth 20 (Y20) merupakan kelompok keterlibatan resmi G20 yang mempertemukan pemuda dari negara anggota untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi para pemimpin dunia. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan peran pemuda dalam diplomasi multilateral melalui Y20, dengan Y20 Indonesia 2022 pada masa Presidensi G20. Indonesia sebagai kasus utama, serta perbandingan terbatas dengan Y20 India (2023), Brasil (2024), dan Afrika Selatan (2025). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang diperkaya perbandingan singkat, dengan data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan dianalisis secara tematik berdasarkan perspektif multilateralisme, diplomasi publik dan multi jalur, serta tangga partisipasi pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Y20 berfungsi sebagai ruang sosialisasi diplomatik, mekanisme penentuan agenda, dan saluran inklusi bagi kelompok yang kurang terwakili, tetapi pengaruhnya terhadap keputusan pemimpin masih bersifat konsultatif dan tidak mengikat sehingga menyisakan risiko tokenisme. Artikel ini merekomendasikan pelebagaan hubungan antara Y20 dan jalur Sherpa G20, kesinambungan antar presidensi, serta mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemuda.

Kata Kunci: Y20, G20, diplomasi multilateral, diplomasi pemuda, Presidensi G20 Indonesia.

Abstract

Youth 20 (Y20) is the official youth engagement group of the G20, bringing together young people from member states to draft policy recommendations for world leaders. This article examines the role of youth in multilateral diplomacy through the Y20, using Y20 Indonesia 2022, held during Indonesia's G20 Presidency, as its main case, complemented by brief comparisons with the Y20 in India (2023), Brazil (2024), and South Africa (2025). Using a descriptive-analytical qualitative approach based on document analysis, the study combines perspectives on multilateralism, public and multi-track diplomacy, and the ladder of youth participation. The findings show that the Y20 works as a space for diplomatic socialization, an agenda-setting mechanism, and a channel for including

Article History

Received: September 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by :** CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

underrepresented groups, yet its influence on leaders' decisions remains consultative and non-binding, leaving a real risk of tokenism. The article recommends institutionalizing links between the Y20 and the G20 Sherpa track, ensuring continuity across presidencies, and establishing mechanisms to monitor follow-up on youth recommendations.

Keywords: Y20, G20, multilateral diplomacy, youth diplomacy, Indonesia's G20 Presidency

PENDAHULUAN

Diplomasi multilateral pada abad ke-21 tidak lagi dianggap sebagai ruang eksklusif para diplomat profesional dan pemimpin pemerintahan. Masalah global yang semakin kompleks seperti pandemic, perubahan iklim, gangguan digital dan ketidakadilan ekonomi, telah mendorong forum-forum antar pemerintah untuk menjadi lebih terbuka terhadap kontribusi dari aktor non-negara, termasuk pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serikat pekerja, kelompok perempuan, serta komunitas muda (Tallberg dkk., 2013). Kelompok Dua Puluh (G20) adalah salah satu contoh paling mencolok dari perkembangan ini. Dimulai dari pertemuan menteri keuangan serta gubernur bank sentral pada tahun 1999, dan berlanjut menjadi pertemuan tingkat pemimpin negara pada tahun 2008 di tengah krisis finansial global, G20 telah berevolusi menjadi forum utama untuk koordinasi ekonomi internasional yang mencakup sebagian besar populasi dan produk domestik bruto di dunia (Cooper, 2010; Kirton, 2013).

Untuk menghubungkan proses antara pemerintahan dan masyarakat, G20 menciptakan kelompok-kelompok keterlibatan seperti Bussines 20, Civil 20, Labour 20, Think 20, Women 20, Science 20, dan Youth 20 (Y20). Y20 dikembangkan sebagai platform resmi bagi pemuda dari negara-negara anggota untuk berdiskusi, berdebat, bernegosiasi, dan menyusun kesepakatan tentang rekomendasi kebijakan yang dijabarkan dalam sebuah deklarasi bersama (G20 Brasil, 2024). G20 mendefinisikan peserta Y20 sebagai individu muda berusia antara 18 hingga 30 tahun. Asal mula Y20 dapat ditelusuri dari forum pemuda yang menyertai G7 dan G8, yang dikenal sebagai Y7 atau Y8 sejak tahun 2006 di Saint Petersburg, sementara KTT Y20 yang pertama diadakan pada tahun 2010 di Kanada (G20 Brasil, 2024).

Diplomasi memiliki peran penting dalam pengembangan kapasitas pemuda setidaknya karena empat faktor. Pertama, diplomasi membentuk cara pandang global sejak usia muda dengan mendorong generasi muda untuk memahami berbagai isu dunia, meliputi krisis kesehatan inovasi teknologi, dan masalah hak asasi manusia, dengan perspektif yang lebih luas dibandingkan hanya sudut pandang nasional. Kedua, diplomasi mengasah keterampilan komunikasi dan negosiasi karena anak muda dituntut untuk mengungkapkan ide dengan cara yang strategis, mendengarkan berbagai pendapat, dan mencari solusi di tengah perbedaan yang ada. Ketiga, partisipasi dalam diplomasi menumbuhkan kepemimpinan yang adaptif dan strategis, terutama saat menghadapi masalah global yang rumit dan perubahan yang cepat. Keempat, diplomasi membuka peluang dan jaringan di tingkat regional maupun internasional, sehingga generasi muda memiliki lebih banyak ruang untuk berbagai pengetahuan, membangun kerjasama, dan mengembangkan potensi mereka dalam konteks global (Andriani, D., 2026).

Bagi Indonesia, isu ini memiliki aspek tambahan. Komposisi penduduk Indonesia ditandai oleh jumlah besar penduduk muda, sehingga pemerintah dan berbagai pihak sering membahas potensi bonus demografi, yaitu situasi ketika populasi usia produktif jauh lebih banyak daripada yang nonproduktif. Potensi ini hanya akan memberikan keuntungan jika

generasi muda mendapatkan pendidikan, kesempatan kerja, dan ruang partisipasi yang cukup. Dalam konteks politik luar negeri, ruang partisipasi tersebut meliputi kesempatan untuk memahami dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan diplomasi negaranya. Dengan kata lain, investasi dalam diplomasi pemuda bukan hanya sebuah program formal, tetapi juga merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan nasional dalam jangka panjang di tingkat internasional.

Walaupun demikian, pertanyaan kritis masih perlu diajukan: Apakah Y20 benar-benar berpengaruh terhadap keputusan para pemimpin ataukah hanya menjadi forum simbolis yang menambah nilai inklusivitas G20? Pertanyaan ini penting bagi Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia berperan sebagai Presidensi G20 dengan tema *Recover Together, Recover Stronger* dan menjadi tuan rumah Y20 Summit yang mempertemukan sekitar 80 delegasi sekaligus 20 pengamat di Jakarta dan Bandung antara 17 hingga 24 Juli 2022 (Wijaya, 2022). Penyelenggaraan tersebut memberikan contoh yang bagus untuk mengevaluasi bagaimana generasi muda berkontribusi dalam diplomasi multilateral dan bagaimana negara tuan rumah mendukung peran tersebut di tengah kondisi geopolitik yang penuh ketegangan.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini mengembangkan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, dalam hal apa Y20 mengarahkan posisi pemuda dalam kerangka diplomasi multilateral G20? Kedua, bagaimana pelaksanaan dan hasil Y20 Indonesia 2022 sebagai contoh dalam konteks diplomasi pemuda, dan apa yang dapat dipelajari dari perbandingan dengan penyelenggaraan Y20 di presidensi yang akan datang? Ketiga, seberapa besar Y20 berkontribusi pada pengambilan keputusan di G20 dan tantangan apa yang menghambat pengaruh tersebut? Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mengaitkan teori diplomasi dengan contoh spesifik, serta merumuskan saran untuk memperkuat peran pemuda dalam diplomasi Indonesia. Artikel ini dibagi menjadi tujuh bagian: abstrak (*abstract*), pendahuluan (*introduction*), tinjauan pustaka (*literature review*), metode (*method*), pembahasan (*discussion*), penutup (*conclusion*), dan daftar pustaka (*reference*).

TINJAUAN PUSTAKA

a. Multilateralisme dan diplomasi multilateral

Ruggie (1992) mengartikan multilateralisme sebagai suatu bentuk institusi yang mengoordinasikan interaksi antara tiga negara atau lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang bersifat umum, yaitu norma yang menentukan tindakan yang sesuai tanpa memperhatikan kepentingan khusus para pihak atau kondisi strategis pada setiap kejadian. Dengan demikian, yang membedakan multilateralisme dari sekadar banyaknya pihak adalah kualitas interaksinya: prinsip umum, karakter yang tidak terpilah, dan resiprositas yang meluas. Kahler (1992) menegaskan bahwa multilateralisme selalu beroperasi dalam ketegangan antara jumlah peserta yang besar dan kecil. Dari perspektif ini, forum dengan jumlah peserta terbatas seperti G20 dapat dipahami sebagai usaha untuk menyeimbangkan efektivitas dengan legitimasi.

Berridge (2015) melihat diplomasi sebagai cara utama bagi negara untuk mengatur hubungannya dengan pihak lain melalui komunikasi serta negosiasi. Diplomasi multilateral menambah tingkat kompleksitas karena adanya banyak pihak, aturan prosedur, pembentukan aliansi, dan penyusunan dokumen kesepakatan bersama. Dalam perspektif institusionalis, forum multilateral menurunkan biaya transaksi, menawarkan informasi, dan memperpanjang pandangan ke depan tentang kerjasama (Keohane, 1984). Bjola dan Kornprobst (2013) menyoroti aspek komunikasi dan sosial dalam diplomasi: negosiasi bukan hanya pertukaran kepentingan, tetapi juga pengalaman belajar, proses persuasi, dan pengembangan identitas kolektif. Aspek ini sangat relevan untuk Y20, di mana para delegasi muda belajar praktik diplomasi dengan mengalaminya secara langsung.

Secara spesifik, G20 dirancang sebagai sebuah komite darurat yang bersifat sementara serta sebagai komite penentu yang diperebutkan untuk tingkat global (Cooper, 2010). Validitasnya selalu diragukan disebabkan oleh keanggotaannya yang terbatas, dan Kirton (2013) menganalisis kinerja serta validitas G20 dalam pengelolaan global. Masalah validitas ini menciptakan peluang bagi keberadaan kelompok keterlibatan, termasuk Y20, menjadi krusial: G20 berusaha untuk memperluas dukungan sosial bagi keputusan yang dibuat oleh sekelompok kecil pemimpin.

b. Diplomasi public, diplomasi multijalur, dan aktor non-negara

Studi tentang diplomasi saat ini menunjukkan pergeseran dari model yang fokus pada negara ke jenis diplomasi yang melibatkan berbagai aktor (Hocking dkk., 2012). Melissen (2005) menyebut bentuk baru dari diplomasi publik sebagai usaha untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat internasional, bukan sekadar penyebaran informasi satu arah. Cull (2008) membagi berbagai jenis diplomasi publik menjadi lima elemen, yang meliputi mendengarkan, advokasi, budaya diplomasi, pertukaran diplomasi, dan penyiaran di tingkat internasional. Dalam konteks ini, forum seperti Y20 memiliki dua makna: berfungsi sebagai alat soft power bagi negara tuan rumah dan memberikan ruang otonom bagi generasi muda untuk menjalin jaringan antarnegara serta menyampaikan kepentingan mereka.

Tallberg dkk., (2013) menunjukkan bahwa lembaga internasional semakin terbuka terhadap kehadiran aktor transnasional, baik karena kebutuhan akan keahlian dan legitimasi maupun dorongan dari masyarakat sipil. Scholte (2011) menegaskan bahwa sekadar memberikan akses tidaklah cukup; akuntabilitas global mengharuskan adanya responsivitas dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap mereka yang terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Sudut pandang ini sangat penting dalam menilai Y20: apakah pembukaan peluang bagi generasi muda disertai tanggung jawab bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan rekomendasi yang mereka ajukan? Putnam (1988) melalui konsep permainan dua tingkat, juga mengingatkan bahwa diplomasi selalu berlangsung dalam dua arena, yakni internasional dan domestik secara bersamaan. Delegasi pemuda menjembatani kedua arena tersebut, karena mereka mewakili negara asal mereka dalam forum global dan juga membawa kembali norma, jaringan, serta pengetahuan ke dalam ruang kebijakan domestik.

c. Partisipasi pemuda

Literatur partisipasi pemuda menyediakan alat untuk membedakan keterlibatan yang bermakna dari keterlibatan yang simbolik. Hart (1992) mengajukan tangga partisipasi dengan delapan anak tangga, dari manipulasi, dekorasi, dan tokenism pada tingkat bawah, hingga partisipasi yang diprakarsai anak dan pengambilan keputusan bersama dengan orang dewasa pada tingkat atas. Checkoway (2011) melihat keterlibatan generasi muda sebagai partisipasi dalam menghadapi isu-isu yang berdampak pada kehidupan mereka dan komunitasnya, dengan menekankan signifikansi dampak konkret terhadap pilihan serta keuntungan pendidikan bagi generasi muda itu sendiri.

Penting untuk dipahami bahwa batasan usia pemuda tidak seragam. Untuk tujuan statistik, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan rentang usia mulai dari 15 hingga 24 tahun, sementara Undang-Undang Kepemudaan Indonesia menetapkan usia 16 hingga 30 tahun, dan G20 mempertimbangkan usia 18 sampai 30 tahun untuk Y20. Perbedaan ini bukan hanya masalah teknis, karena definisi tersebut menentukan siapa yang dianggap berhak mewakili pemuda dan siapa yang tidak, contohnya remaja di bawah 18 tahun yang terpengaruh langsung oleh kebijakan pendidikan tetapi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Y20. Selain itu, banyak negara mengirimkan perwakilan pemuda ke sidang Majelis Umum PBB sebagai bagian dari delegasi resmi, sehingga keterlibatan pemuda dalam diplomasi multilateral tidak terbatas hanya pada Y20 tetapi juga melalui saluran lain.

Di skala global, isu pemuda semakin menjadi fokus yang terstruktur. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2250 (2015) mengakui peran positif pemuda dalam menciptakan perdamaian dan keamanan serta mendorong agar mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Hart (1992), adanya platform partisipasi tidak selalu memastikan bahwa pendapat kaum muda memiliki dampak. Y20 harus dievaluasi tidak hanya berdasarkan partisipasi pemuda, tetapi juga melihat di mana posisi mereka dalam skala partisipasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang diperkaya perbandingan singkat. Studi kasus dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks nyatanya, ketika batas antara fenomena dan konteks tidak selalu tegas. Kasus utama adalah Y20 Indonesia 2022, yang dipilih secara purposif karena tiga alasan: Indonesia menjadi pemegang Presidensi G20 pada tahun tersebut, prosesnya terdokumentasi cukup baik, dan kasus ini memuat inovasi inklusi yang layak dikaji. Sebagai pembanding, penelitian ini menelaah Y20 India (2023), Brasil (2024), dan Afrika Selatan (2025) untuk melihat pola kesinambungan dan variasi antarpresidensi. Teknik pengumpulan data adalah analisis dokumen (Bowen, 2009). Sumber data meliputi laman resmi G20 dan Y20 yang memuat definisi, sejarah, dan jadwal kegiatan; dokumen program penyelenggara, termasuk jadwal pelaksanaan Y20 Brasil 2024; laporan akademik mengenai Y20 India 2023 (Kaushik, 2024); serta pemberitaan dan artikel opini dari media nasional berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post dan Jakarta Globe, dan laporan dari situs Green Network Asia mengenai peluncuran white paper Y20 Indonesia 2022. Data dari media diperlakukan sebagai sumber sekunder yang perlu dikonfirmasi silang dengan sumber lain apabila memuat klaim faktual. Ketika informasi antarsumber tidak sepenuhnya selaras, misalnya mengenai susunan pimpinan penyelenggara, artikel ini memilih tidak menyebutkan rincian tersebut, dan hanya memakai informasi yang didukung secara konsisten. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2014). Pada tahap reduksi, informasi dipilah berdasarkan empat dimensi analisis yang diuraikan pada bagian tinjauan pustaka. Pada tahap penyajian, temuan disusun dalam narasi kasus dan tabel perbandingan. Pada tahap penarikan kesimpulan, temuan dipertentangkan dengan kerangka teoretis untuk menilai posisi Y20 pada spektrum partisipasi simbolik hingga partisipasi berpengaruh. Untuk menjaga keandalan, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari dokumen resmi, laporan akademik, dan media. Terdapat beberapa keterbatasan. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder dan tidak mencakup wawancara dengan delegasi, penyelenggara, maupun pejabat jalur Sherpa, sehingga penilaian terhadap dampak substantif komunikasi pada teks deklarasi pemimpin bersifat terbatas. Selain itu, lingkup perbandingan dibatasi pada empat presidensi terakhir. Kesimpulan yang ditarik karenanya bersifat analitis dan tentatif, dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan data primer.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

a. Posisi Y20 dalam arsitektur diplomasi G20

Kerja G20 secara umum berlangsung melalui dua jalur utama: jalur Sherpa yang menangani isu-isu sosial-ekonomi, politik, dan pembangunan, serta jalur keuangan yang dipimpin menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Di samping itu, terdapat keterlibatan organisasi Y20 yang tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi diberi kesempatan menyampaikan rekomendasi. Y20 merupakan forum konsultasi resmi bagi pemuda dari seluruh negara anggota untuk berdialog satu sama lain, dengan hasil utama berupa komunikasi yang diserahkan kepada presidensi agar keputusan menteri dan pemimpin memperhatikan

kebutuhan dan pandangan pemuda (G20 Brasil, 2024; Kaushik, 2024). Perwakilan UNESCO di Brasil mengatakan pemuda dapat memainkan peran aktif dan relevan dalam mempromosikan dan memperkuat tindakan untuk menghadapi tantangan dan mendorong perubahan baik secara lokal maupun global, berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan inklusif UNESCO. (2024, June 19).

Dalam praktiknya, presidensi tuan rumah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan dinamika Y20. Otoritas presidensi ini mencakup penetapan penyelenggara lokal, penentuan tema prioritas yang selaras dengan agenda nasional tuan rumah, penyusunan jadwal kegiatan, hingga penetapan mekanisme seleksi delegasi. Karakteristik ini menghadirkan “dua wajah” Y20 yang kontradiktif, di satu sisi keterikatan yang erat pada presidensi membuka akses institusional yang signifikan, misalnya melalui dukungan kepada kementerian terkait dan akses jaringan diplomatic hingga kesempatan strategis untuk menyerahkan dokumen rekomendasi kebijakan (*policy communique*) langsung kepada perwakilan pemerintah.

Di sisi lain ketergantungan structural ini membawa konsekuensi yang lumayan serius. Agenda Y20 menjadi sangat rentan terserap dalam prioritas politik tuan rumah, sehingga dapat kurang bisa mencerminkan isu-isu global yang mendesak atau konsisten secara jangka panjang. Presidensi G20 memang memiliki ruang besar dalam menentukan agenda, tema serta mekanisme penyelenggaraan Engagement Groups, termasuk Y20 (Young Australians in International Affairs, 2025). Dengan kondisi yang seperti itu menunjukkan bahwa posisi Y20 sebagai Engagement Group tetap memiliki keterkaitan erat dengan struktur presidensi G20. Dalam kajian mengenai institusionalisasi Engagement groups, hubungan yang kuat dengan negara tuan rumah juga memengaruhi kelangsungan dan pola keterlibatan kelompok-kelompok tersebut dalam proses G20 Hüttemann, N. (2026).

Selain itu, model penyelenggaraan yang bergantung pada presidensi tahunan berpotensi menimbulkan persoalan keberlangsungan dan memori institusional. Setiap pergantian presidensi membawa prioritas, kapasitas, sumber daya, dan pendekatan penyelenggaraan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi konsistensi agenda dan proses internal Y20 dari tahun ke tahun. Ketika tidak disertai mekanisme tindak lanjut yang kuat juga rekomendasi yang telah dihasilkan juga beresiko tidak berlanjut pada periode berikutnya. Hal ini terlihat dalam Y20 Afrika Selatan 2025, ketika perbedaan pendekatan presidensi turut memengaruhi proses internal hingga tidak tercapainya komunikasi Bersama (Young Australians in International Affairs, 2025). Oleh karena itu diperlukan yang namanya mekanisme transisi antar-presidensi, penguatan jaringan alumni dan pemantauan rekomendasi agar agenda Y20 tetap berkelanjutan dalam proses G20 (G20 South Africa, 2025).

b. Kasus Y20 Indonesia 2022

Presidensi G20 Indonesia berlangsung dengan tema *Recover Together, Recover Stronger*, sebuah tema yang menegaskan pemulihan bersama pascapandemi (Kusuma, 2022). Konteks diplomatiknya tidak mudah, sebab pada tahun yang sama perang di Ukraina memperdalam perpecahan di antara anggota G20. Dalam suasana seperti itu, Y20 menjadi salah satu saluran yang relatif dapat menghadirkan dialog antar lintas tanpa terikat sepenuhnya oleh kalkulasi kepentingan strategis antarnegara. Penyelenggaraan resmi Y20 Indonesia 2022 adalah organisasi nirlaba Indonesian Youth Diplomacy (IYD) yang bertujuan memberikan eksposur internasional dan pemberdayaan inklusif bagi pemuda Indonesia. Misinya adalah untuk memperluas paparan internasional dan pemberdayaan pemuda Indonesia secara inklusif (Kusuma, 2022). Hal ini menarik dari sisi diplomasi karena penyelenggaraan forum pemuda resmi G20 dipercayakan kepada organisasi kepemudaan, bukan sepenuhnya kepada birokrasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi G20 tidak hanya berlangsung melalui jalur antarpemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi aktor non-negara untuk terlibat dalam proses dialog internasional. Organisasi kepemudaan Y20 ini bukan sekedar berperan sebagai

pelaksana kegiatan, tetapi juga menjadi penghubung antara aspirasi generasi muda dan agenda G20. Dengan demikian, keterlibatan organisasi kepemudaan memperlihatkan adanya bentuk *multi-stakeholder diplomacy*, di mana pemerintah tetap menjadi aktor utama tapi untuk proses diplomasi turut melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan perspektif berbeda. Wijaya (2022).

Rangkaian forum Y20 Indonesia 2022 dimulai sejak awal tahun tepatnya pada 17 Januari 2022 penyelenggara meluncurkan white paper yang disusun berdasarkan riset kepustakaan, wawancara dengan para ahli dan survei terhadap pemuda di negara-negara G20. Dokumen itu memuat 5 bidang prioritas yaitu:

1. Ketenagakerjaan pemuda beserta jaringan sosial bagi pekerja informal dan kewirausahaan sosial pemuda.
2. Transformasi digital yang mencakup peran pemuda dalam tata kelola digital dan literasi keuangan digital.
3. Planet yang berkelanjutan dan layak huni.
4. Perlindungan modal alam dan ekonomi sirkular.
5. Keragaman dan inklusi yang mencakup pendidikan inklusif dan ekonomi kreatif. Kusuma (2022).

Rangkaian pertemuan itu kemudian dimulai secara resmi pada Februari 2022 dengan proses yang berlangsung selama berbulan-bulan proses diskusi dan negosiasi kebijakan sebelum puncak acaranya Wijaya (2022).

Y20 Summit berlangsung pada 17-24 Juli 2022 di Jakarta dan Bandung sebagai tahap puncak rangkaian Y20 Indonesia 2022. Kegiatan ini mempertemukan sekitar 100 peserta yang terdiri atas 80 delegasi dari negara-negara anggota G20 dan 20 pengamat dari organisasi internasional maupun regional, termasuk World Bank, WTO, ADB, IsDB, dan ASEAN (Wijaya, 2022). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Y20 tidak hanya berfungsi sebagai ruang pertemuan antardelegasi muda dari negara G20, tetapi juga membuka keterlibatan aktor non-negara dan organisasi internasional dalam pembahasan isu kepemudaan. Dengan demikian, forum ini menciptakan ruang interaksi yang lebih luas antara perspektif pemuda, organisasi internasional, dan agenda kebijakan G20.

Salah satu aspek yang menonjol dalam penyelenggaraan Y20 Indonesia 2022 adalah upaya memperluas representasi kelompok yang secara historis kurang terwakili. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Y20, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta pengungsi diundang sebagai pengamat resmi dan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam ruang perundingan (Wijaya, 2022). Kehadiran kelompok tersebut memperluas makna representasi dalam Y20, karena pembahasan mengenai persoalan pemuda tidak hanya didasarkan pada perspektif negara, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman kelompok yang menghadapi hambatan sosial dan politik secara langsung. Inovasi ini menunjukkan bahwa inklusivitas dalam Y20 tidak berhenti pada keberagaman asal negara delegasi, tetapi juga diarahkan pada keberagaman pengalaman dan posisi sosial yang dibawa ke dalam proses perumusan rekomendasi.

Perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa rekomendasi Y20 diadopsi secara langsung ke dalam teks G20 Leaders' Declaration. Ketiadaan bukti tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Y20 tidak memiliki pengaruh terhadap proses G20. Pengaruh dapat berlangsung secara tidak langsung melalui peminimalan isu, pertukaran gagasan, jejaring antara delegasi muda dengan aktor G20, maupun penyampaian rekomendasi kepada G20 Sherpa dan Working Groups. Namun, bentuk pengaruh semacam ini sulit dibuktikan hanya melalui perbandingan dokumen karena kesamaan isu atau substansi tidak selalu menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara rekomendasi Y20 dan kebijakan G20.

Dengan demikian, keterbatasan dalam melacak perjalanan suatu rekomendasi dari Y20 hingga proses pengambilan keputusan G20 justru menjadi salah satu temuan penelitian. Y20 memiliki mekanisme formal untuk menyampaikan hasil *Communiqué* kepada aktor G20, tetapi tidak ditemukan mekanisme pelacakan yang secara transparan menunjukkan bagaimana setiap rekomendasi tersebut dipertimbangkan setelah disampaikan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara keberhasilan Y20 dalam menghasilkan dan menyampaikan rekomendasi dengan kemampuan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar memengaruhi hasil kebijakan G20.

c. Perbandingan dengan Y20 India, Brasil, dan Afrika Selatan

Perbandingan dengan presidensi-presidensi setelah Indonesia memperlihatkan pola yang sama mulai dari format sekaligus tema. Tabel 1 merangkum ciri utama keempat penyelenggaraan.

Tabel 1. Perbandingan penyelenggaraan Y20 2022-2025

Aspek	Indonesia 2022	India 2023	Brasil 2024	Afrika Selatan 2025
Lokasi dan waktu	Jakarta dan Bandung, 17-24 Juli	Pra-KTT di Leh, Ladakh, dan konsultasi kampus	Rio de Janeiro, 10-17 Agustus	Johannesburg, 18-22 Agustus
Tema	Ketenagakerjaan, transformasi digital, planet berkelanjutan, keragaman dan inklusi	Perdamaian, masa depan kerja, iklim, demokrasi, kesehatan	Lima tema prioritas; dialog regional	Mengikuti prioritas presidensi
Ciri khas	Pengamat dari kelompok rentan untuk pertama kalinya	Konsultasi di universitas, modul daring, simulasi KTT	Dibuka di kemlu; Festival Pemuda dan KTT Sosial Y20	Kelanjutan tradisi tahunan

Pada Y20 India 2023, tema-tema utama meliputi pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi dengan slogan menuju era tanpa perang, masa depan pekerjaan dan keterampilan abad ke-21, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, masa depan bersama yang mencakup pemuda dalam demokrasi dan tata kelola, serta kesehatan, kesejahteraan, dan olahraga (Kaushik, 2024). Rangkaian kegiatan menjelang puncak melibatkan acara pembukaan di New Delhi, pertemuan pembuka di Guwahati, pra-KTT di Leh, Ladakh, serta belasan konsultasi di perguruan tinggi dan puluhan sesi urun gagasan bersama lembaga riset dan asosiasi industri, ditambah modul daring dan simulasi KTT G20 di lembaga pendidikan (Kaushik, 2024). Pola ini menunjukkan strategi menjadikan Y20 sebagai gerakan literasi diplomasi yang menjangkau kampus-kampus di berbagai daerah. Pada Y20 Brasil 2024, jadwal penyelenggara memperlihatkan integrasi yang lebih erat dengan birokrasi diplomatik: acara pembuka pada 20 Maret diadakan di Kementerian Luar Negeri di Brasília, pra-KTT dilaksanakan di Belém pada Juni, sedangkan Y20 Summit bersama Festival Pemuda berlangsung pada 10 sampai 17 Agustus di Rio de Janeiro. Sebuah KTT Sosial Y20 juga dijadwalkan pada 15 sampai 17 November, berdekatan dengan KTT Pimpinan G20 pada 18 dan 19 November (G20 Brasil, 2024).

Penyelenggara juga menyusun program dialog regional yang hasilnya dirangkum dalam format standar untuk membekali delegasi Brasil. Rancangan ini menunjukkan upaya menghubungkan proses akar rumput dengan negosiasi puncak, sekaligus memperpanjang keterlibatan pemuda hingga menjelang KTT pemimpin. Pada 2025, Y20 diselenggarakan di Johannesburg pada 18 sampai 22 Agustus di bawah Presidensi G20

Afrika Selatan (Young Diplomats of Canada, 2026), yang menandai berlanjutnya tradisi tahunan Y20 di negara berkembang. Dari perbandingan ini terlihat tiga pola. Pertama, format inti Y20 relatif stabil: white paper atau kertas kerja, konsultasi pra-KTT, negosiasi delegasi, dan komunikasi. Kedua, tema mengikuti prioritas presidensi dan konteks geopolitik: perdamaian menonjol dalam agenda India, sementara Indonesia menekankan pemulihan, transformasi digital, dan inklusi. Ketiga, ada kecenderungan menuju integrasi yang lebih kuat dengan struktur pemerintah, tetapi belum tampak mekanisme yang memastikan keberlanjutan substansi dari satu presidensi ke presidensi berikutnya.

d. Analisis berdasarkan empat dimensi

1. Penentuan agenda: pemuda sebagai wirausahawan norma

Prioritas Y20 Indonesia 2022 menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya membicarakan persoalan yang secara konvensional dikaitkan dengan generasi muda, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi pemuda, tetapi juga memasuki isu tata kelola yang selama ini lebih banyak dibahas dalam ruang teknokratis. Hal tersebut terlihat dari perhatian Y20 terhadap transformasi digital, masa depan pekerjaan, keberlanjutan lingkungan, serta keberagaman dan inklusi. Dalam perspektif teori norma, keterlibatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk peran pemuda sebagai norm entrepreneurs, yaitu aktor yang berupaya memperkenalkan, membingkai, dan mendorong penerimaan terhadap gagasan atau standar tertentu dalam lingkungan internasional. Delegasi Y20, misalnya, tidak hanya memandang persoalan pekerjaan digital sebagai persoalan kesempatan kerja, tetapi juga mengaitkannya dengan perlindungan, kesetaraan, dan keadilan bagi generasi yang akan memasuki pasar kerja yang semakin berubah. Peran ini sejalan dengan pandangan Bjola dan Kornprobst (2013) bahwa diplomasi merupakan praktik komunikatif yang turut membentuk pemahaman bersama antaraktor melalui proses pertukaran gagasan dan representasi kepentingan.

Posisi tersebut memberikan pemuda ruang untuk membawa perspektif yang mungkin tidak sepenuhnya terlihat dalam pendekatan kebijakan yang bersifat teknokratis. Pengalaman langsung generasi muda dengan pasar kerja digital, ekonomi kreatif, perubahan teknologi, serta dampak perubahan iklim dapat menjadi sumber pengetahuan yang melengkapi data dan analisis yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Namun, kemampuan pemuda untuk memengaruhi agenda kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyuarakan isu, tetapi juga oleh kredibilitas dasar pengetahuan yang digunakan untuk mendukung rekomendasi. Penggunaan white paper berbasis riset, wawancara dengan ahli, serta survei lintas negara dapat memperkuat legitimasi argumentasi karena menunjukkan bahwa rekomendasi tidak semata-mata berasal dari pengalaman subjektif delegasi. Dengan demikian, peran Y20 sebagai norm entrepreneur berada pada pertemuan antara pengalaman generasional dan produksi pengetahuan: pemuda membawa perspektif baru ke dalam agenda G20, tetapi daya tawar perspektif tersebut semakin kuat ketika didukung oleh bukti empiris dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Inklusi dan representasi: dari perwakilan negara ke perwakilan pengalaman

Kehadiran penyandang disabilitas, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta pengungsi sebagai pengamat resmi dalam Y20 Indonesia 2022 merupakan langkah penting dalam memperluas makna representasi dalam diplomasi multilateral. Keterlibatan kelompok tersebut menunjukkan bahwa representasi pemuda tidak semata-

mata didasarkan pada asal negara, tetapi juga mulai mempertimbangkan keberagaman pengalaman sosial yang muncul di dalam suatu negara maupun lintas negara. Dalam kerangka Scholte (2011), perluasan ruang partisipasi semacam ini dapat memperkuat legitimasi demokratis dalam tata kelola global karena membuka kesempatan bagi kelompok yang terdampak oleh kebijakan untuk menyampaikan pengalaman dan kepentingannya. Namun, perluasan partisipasi tersebut tetap memiliki batas. Status sebagai pengamat berbeda dari delegasi, sehingga meskipun pengamat dapat hadir dan berkontribusi dalam diskusi, posisi mereka tidak sepenuhnya setara dengan delegasi dalam proses pengambilan keputusan dan finalisasi Communiqué.

Selain persoalan status, representasi Y20 juga menghadapi tantangan pada tahap seleksi delegasi. Ketika proses seleksi pada masing-masing negara sangat bergantung pada penyelenggara atau organisasi yang ditunjuk, terdapat kemungkinan bahwa peserta yang memiliki akses pendidikan, kemampuan bahasa Inggris, pengalaman organisasi, serta jaringan sosial yang lebih kuat akan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Kondisi tersebut dapat menghasilkan representasi yang belum sepenuhnya mencerminkan keragaman pemuda di masing-masing negara. Pengalaman model konsultasi berbasis kampus di India dan dialog regional di Brasil menunjukkan adanya alternatif untuk memperluas basis partisipasi sebelum delegasi ditentukan. Pendekatan semacam ini relevan bagi Indonesia karena karakter geografis dan sosialnya yang sangat beragam. Perluasan konsultasi ke berbagai daerah, termasuk kawasan timur seperti Sulawesi dan Papua, dapat membantu memastikan bahwa agenda yang dibawa ke forum internasional tidak hanya merepresentasikan perspektif pemuda dari pusat-pusat pendidikan dan ekonomi utama, tetapi juga menangkap pengalaman pemuda dari wilayah yang memiliki kondisi sosial dan pembangunan yang berbeda.

3. Sosialisasi dan kapasitas diplomatik

Dimensi sosialisasi dapat menjadi salah satu kontribusi Y20 yang paling nyata karena delegasi memperoleh pengalaman langsung dalam praktik diplomasi yang tidak mudah diperoleh melalui pembelajaran di ruang kelas. Selama proses Y20, peserta tidak hanya menyampaikan pandangan mengenai isu kebijakan, tetapi juga belajar menyusun posisi, membangun koalisi, menegosiasikan rumusan teks, serta melakukan kompromi untuk mencapai konsensus. Interaksi yang berlangsung secara berulang dalam institusi internasional dapat membantu menurunkan biaya interaksi dan membangun kepercayaan antar peserta. Diplomasi sebagai proses pembelajaran dan pembentukan identitas melalui interaksi antaraktor. Pengalaman tersebut juga memiliki nilai jangka panjang karena jejaring yang terbentuk selama Y20 berpotensi terus digunakan ketika para alumni memasuki profesi sebagai diplomat, pejabat publik, akademisi, peneliti, maupun pemimpin organisasi. Dari perspektif diplomasi publik, interaksi antarpemuda lintas negara juga dapat dipahami sebagai bentuk *exchange diplomacy* yang mendorong saling pengertian melalui pengalaman langsung, sekaligus memberikan ruang bagi Indonesia untuk menampilkan identitasnya sebagai negara tuan rumah yang terbuka terhadap keberagaman perspektif (Melissen, 2005; Cull, 2008).

Namun, manfaat sosialisasi tersebut tidak secara otomatis berkembang menjadi kapasitas institusional atau memberikan dampak yang lebih luas setelah forum berakhir. Tanpa mekanisme tindak lanjut, seperti jaringan alumni, program berbagi pengetahuan, atau ruang untuk melibatkan alumni dalam kegiatan diplomasi dan kebijakan publik, pengalaman yang diperoleh berpotensi berhenti pada tingkat individu. Dengan kata lain, keberhasilan Y20 dalam membangun kapasitas diplomatik peserta perlu diikuti dengan mekanisme multiplikasi, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diteruskan kepada pemuda lain. Pengalaman Y20 India menunjukkan salah satu kemungkinan mekanisme tersebut melalui penyediaan modul daring dan simulasi KTT G20

di lingkungan kampus, yang memungkinkan pengalaman dan pengetahuan mengenai diplomasi G20 menjangkau peserta yang lebih luas di luar delegasi resmi (Kaushik, 2024). Model semacam ini menunjukkan bahwa sosialisasi diplomatik dapat dirancang bukan hanya sebagai pengalaman eksklusif bagi peserta Y20, tetapi sebagai proses pembelajaran yang memiliki efek berantai kepada komunitas pemuda yang lebih luas.

4. Pengaruh dan akuntabilitas: tempat Y20 pada tangga partisipasi

Bila dibaca dengan tangga partisipasi Hart (1992), Y20 tampaknya berada pada tingkat menengah: pemuda diajak berkonsultasi dan diberi informasi, prosesnya diprakarsai dan dibingkai oleh otoritas dewasa atau negara, dan hasilnya berupa rekomendasi yang tidak mengikat. Y20 jelas lebih tinggi dari dekorasi atau tokenism murni, sebab delegasi menyusun posisi yang substansial dan menyerahkannya secara resmi kepada wakil pemerintah. Namun, Y20 belum mencapai tingkat pengambilan keputusan bersama, karena pemuda tidak memiliki kursi dalam pengambilan keputusan di KTT. Tuntutan yang muncul dalam komunike Y20 Indonesia agar perwakilan Y20 dilibatkan di KTT pemimpin memperlihatkan kesadaran para delegasi sendiri akan batas tersebut (Jakarta Globe, 2022). Dari sisi akuntabilitas (Scholte, 2011), masalah utamanya adalah ketiadaan kewajiban formal bagi pembuat keputusan untuk menjawab rekomendasi. Janji advokasi dari pejabat senior, betapapun tulus, belum merupakan mekanisme akuntabilitas. Situasi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai kesenjangan responsivitas: pemuda memberi masukan, tetapi tidak ada jalur baku untuk mengetahui apakah masukan itu dipertimbangkan, diubah, atau diabaikan. Dalam kerangka Putnam (1988), delegasi pemuda memang menjembatani dua arena, tetapi kesenjangan ini mengurangi nilai jembatan tersebut karena arus informasi kembali dari arena pengambilan keputusan ke arena pemuda sangat terbatas. Perbandingan dengan kelompok keterlibatan lain menambah gambaran. Kelompok yang mewakili kepentingan ekonomi, seperti Business 20, sering dinilai memiliki akses yang lebih mudah kepada perumus kebijakan karena kepentingannya bersinggungan langsung dengan agenda ekonomi G20. Y20, sebaliknya, membawa kepentingan yang lebih tersebar dan kurang memiliki sumber daya politik untuk menekan. Kondisi ini memperbesar pentingnya mekanisme kelembagaan yang menjamin bahwa suara pemuda tidak hanya didengar karena kebaikan hati presidensi, tetapi karena adanya prosedur yang baku. Terdapat pula ketegangan legitimasi ganda. Di satu sisi, Y20 membutuhkan pengakuan negara agar rekomendasinya dianggap resmi. Di sisi lain, ia membutuhkan kepercayaan pemuda agar dipandang mewakili aspirasi generasinya, bukan sekadar juru bicara pemerintah. Ketika kedua tuntutan ini bertabrakan, penyelenggara harus menjaga keseimbangan antara diplomasi yang santun dan advokasi yang kritis. Pernyataan lantang dalam upacara penutupan Y20 Indonesia, yang menyebut pemuda lelah dijadikan objek ambisi politik, menunjukkan bahwa ruang untuk sikap kritis itu ada, setidaknya dalam batas tertentu (Jakarta Globe, 2022).

5. Tantangan structural

Beberapa tantangan struktural membatasi efektivitas Y20 sebagai ruang diplomasi pemuda. Pertama, fragmentasi geopolitik dapat memengaruhi dinamika negosiasi karena perbedaan kepentingan antaranggota G20 juga berpotensi terbawa ke forum pemuda. Perbedaan pandangan mengenai perang, keamanan, dan tatanan internasional dapat menyulitkan delegasi untuk menghasilkan rumusan bersama, terutama pada isu yang memiliki dimensi politik sensitif. Pengalaman Y20 India 2023 yang mengangkat *peace and reconciliation* sebagai salah satu tema prioritas menunjukkan bahwa persoalan konflik dan ketegangan geopolitik telah menjadi bagian dari agenda diplomasi pemuda, bukan isu yang sepenuhnya berada di luar ruang pembahasan Y20 (Kaushik, 2024). Kedua, terdapat diskontinuitas kelembagaan karena kepemimpinan dan penyelenggara Y20 berganti mengikuti presidensi G20 setiap tahun. Pergantian tersebut dapat menyebabkan

pengalaman, jejaring, serta proses tindak lanjut rekomendasi tidak terdokumentasi dan diteruskan secara konsisten. Ketiga, kesenjangan sumber daya juga memengaruhi kesetaraan partisipasi. Delegasi dari negara dengan dukungan institusional dan finansial yang lebih kuat dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, riset, pelatihan, maupun pengalaman diplomatik dibandingkan delegasi dari negara dengan sumber daya terbatas.

Selain persoalan tersebut, Y20 juga menghadapi risiko instrumentalisasi. Ketergantungan yang kuat pada presidensi dan dukungan pemerintah dapat memberikan akses institusional, tetapi pada saat yang sama membuka kemungkinan bahwa keterlibatan pemuda lebih banyak digunakan untuk menunjukkan citra keterbukaan dan inklusivitas daripada menghasilkan perubahan kebijakan yang dapat dilacak. Karena itu, efektivitas Y20 tidak cukup diukur dari terselenggaranya forum atau banyaknya rekomendasi yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana rekomendasi tersebut memperoleh ruang dalam proses kebijakan G20. Tantangan terakhir adalah literasi dan akses publik. Y20 belum tentu dikenal secara luas oleh pemuda di luar lingkungan kampus, organisasi kepemudaan, atau kota-kota besar. Kondisi ini dapat membuat partisipasi lebih mudah dijangkau oleh kelompok yang sejak awal memiliki akses terhadap informasi, kemampuan bahasa, jaringan organisasi, dan sumber daya untuk mengikuti proses seleksi. Dengan demikian, persoalan representasi Y20 tidak hanya berkaitan dengan siapa yang hadir dalam forum, tetapi juga dengan siapa yang memiliki kesempatan untuk mengetahui, mengakses, dan memengaruhi proses tersebut sejak tahap awal.

6. Dimensi digital dan pascapandemi

Pandemi COVID-19 mengubah cara forum multilateral bekerja, sebab rapat daring menjadi lazim dan proses kerja yang panjang dapat dijalankan tanpa selalu bertemu langsung. Y20 Indonesia menjalani proses persiapan berbulan-bulan sebelum puncak acara (Wijaya, 2022), pola bertahap yang lazim diuntungkan oleh alat komunikasi daring karena memudahkan partisipasi lintas zona waktu. Namun, format ini juga menimbulkan tantangan berupa kesenjangan akses internet dan kelelahan peserta. Bagi diplomasi pemuda, format hibrida menawarkan peluang memperluas partisipasi tanpa biaya perjalanan yang besar, tetapi pertemuan langsung pada tahap akhir tetap penting karena kepercayaan dan kompromi sering terbentuk melalui interaksi tatap muka.

e. Implikasi bagi diplomasi Indonesia

Bagi Indonesia, kasus Y20 2022 memiliki implikasi yang melampaui satu tahun presidensi. Pertama, Y20 sejalan dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif yang menekankan peran aktif Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dan kerja sama global. Pelibatan pemuda memperkaya diplomasi Indonesia dengan sumber gagasan baru dan memperluas basis dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri. Kedua, penyelenggaraan Y20 memperlihatkan kapasitas Indonesia sebagai konvener yang mampu memfasilitasi dialog lintas kepentingan, sebuah aset soft power yang layak dirawat (Nye, 2004). Ketiga, pengalaman inklusi pada Y20 Indonesia, khususnya penyertaan kelompok rentan sebagai pengamat, dapat menjadi rujukan bagi praktik diplomasi Indonesia di forum lain, misalnya ASEAN dan PBB.

Keempat, momentum tahun 2022 perlu dijaga melalui kebijakan berkelanjutan. Indonesia dapat mengoordinasikan kementerian luar negeri, kementerian yang membidangi kepemudaan, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan dalam program pembinaan pemuda diplomasi yang berkelanjutan, misalnya pelatihan negosiasi, simulasi sidang multilateral, dan pemagangan di perwakilan RI. Pengalaman Brasil yang mengaitkan pembukaan Y20 dengan kementerian luar negerinya sendiri menunjukkan bahwa kedekatan dengan birokrasi diplomatik dapat menjadi sarana penguatan jalur komunikasi, asalkan otonomi substansi pemuda tetap terjaga (G20 Brasil, 2024).

PENUTUP

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa Y20 memosisikan pemuda sebagai aktor dalam diplomasi multilateral G20 melalui mekanisme konsultasi resmi yang menghasilkan komunikasi kebijakan. Kasus Y20 Indonesia 2022 memperlihatkan bahwa proses tersebut dapat berjalan secara sistematis, mulai dari penyusunan white paper berbasis riset, negosiasi berbulan-bulan, hingga penyerahan komunikasi kepada wakil pemerintah. Kasus ini juga memperkenalkan inovasi inklusi dengan mengundang penyandang disabilitas, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta pengungsi sebagai pengamat resmi. Perbandingan dengan India, Brasil, dan Afrika Selatan menunjukkan format inti yang stabil dengan variasi tema dan strategi keterlibatan. Berdasarkan empat dimensi analisis, Y20 berperan kuat dalam sosialisasi dan pembangunan kapasitas diplomatik, cukup kuat dalam perumusan agenda dan inklusi, tetapi lemah dalam pengaruh dan akuntabilitas. Pada tangga partisipasi, Y20 berada pada tingkat konsultatif: lebih dari sekadar simbol, tetapi belum mencapai pengambilan keputusan bersama. Pertanyaan yang diajukan pada awal artikel dengan demikian dijawab secara berimbang: Y20 bukan sekadar ornamen, tetapi juga belum menjadi penentu keputusan. Nilai terbesarnya terletak pada pembentukan generasi diplomat dan warga global yang terlatih bernegosiasi, serta pemberian ruang bagi suara yang selama ini jarang kita dengar.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengajukan lima rekomendasi. Pertama, pelembagaan jalur komunikasi antara Y20 dan jalur Sherpa, misalnya melalui sesi presentasi komunikasi kepada para Sherpa dan menteri terkait, serta penunjukan penghubung pemerintah yang bertanggung jawab menanggapi rekomendasi. Kedua, pembentukan mekanisme pelacakan rekomendasi yang dapat diakses publik dan dipertahankan lintas presidensi, agar pemuda dan pemangku kepentingan dapat mengetahui nasib tiap rekomendasi. Ketiga, penguatan kesinambungan melalui kerja sama antara presidensi sebelumnya, saat ini, dan berikutnya, serta pemanfaatan alumni sebagai penjaga memori institusi. Keempat, perluasan basis partisipasi domestik melalui konsultasi di kampus dan daerah, seleksi delegasi yang transparan dan inklusif, serta dukungan bagi delegasi dari kelompok kurang mampu. Kelima, pengintegrasian Y20 ke dalam program pembinaan diplomasi pemuda nasional agar pengalaman individu berubah menjadi kapasitas kelembagaan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer, seperti wawancara dengan delegasi dan pejabat Sherpa, serta analisis isi komparatif antara komunikasi Y20 dan deklarasi pemimpin G20 untuk menilai pengaruh substantif secara lebih tepat. Kajian jangka panjang terhadap karier alumni Y20 juga akan memperkaya pemahaman tentang dampak pembinaan diplomasi pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. (2026, February 9). 4 manfaat diplomasi bagi generasi muda, dari panggung global hingga lokal. Hypeabis.id. <https://hypeabis.id/read/54415/4-manfaat-diplomasi-bagi-generasi-muda-dari-panggung-global-hingga-lokal>.
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice* (edisi ke-5). Palgrave Macmillan.
- Bjola, C., & Kornprobst, M. (2013). *Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics*. Routledge.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Checkoway, B. (2011). What is youth participation? *Children and Youth Services Review*, 33(2), 340-345.
- Cooper, A. F. (2010). The G20 as an improvised crisis committee and/or a contested 'steering committee' for the world. *International Affairs*, 86(3), 741-757.

- Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press.
- Cull, N. J. (2008). Public diplomacy: Taxonomies and histories. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 31-54.
- G20 Brasil. (2024). Youth (Y20). Diakses dari <https://www.g20.org/en/g20-social/engagement-groups/youth>
- G20 South Africa. (2025). *Y20 South Africa 2025 concept note*. G20 South Africa. <https://www.g20.org.za/wp-content/uploads/2025/06/Y20-South-Africa-Concept-Note-April.pdf>
- Hart, R. A. (1992). *Children's Participation: From Tokenism to Citizenship*. UNICEF Innocenti Research Centre.
- Hüttemann, N. (2026). Institutionalizing international forums: The increasing role of G7 and G20 engagement groups. *Global Society*. <https://doi.org/10.1080/13600826.2026.2686231>.
- Hocking, B., Melissen, J., Riordan, S., & Sharp, P. (2012). *Futures for Diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21st Century*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83-119. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Indonesia Youth Diplomacy. (2022). *Y20 Indonesia 2022: Momentum Pemuda di Presidensi G20 Indonesia*.
- Jakarta Globe. (2022). Y20 Summit ends with policy recommendations for G20 leaders. Diakses dari <https://jakartaglobe.id/news/y20-summit-ends-with-policy-recommendations-for-g20-leaders>.
- Kahler, M. (1992). Multilateralism with small and large numbers. *International Organization*, 46(3), 681-708.
- Kaushik, P. (2024). Y20 India 2023 [Laporan]. *Vantage: Journal of Thematic Analysis*, 5(1), 81-83. <https://doi.org/10.52253/vjta.2024.v05i01.10>.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Kirton, J. J. (2013). *G20 Governance for a Globalized World*. Ashgate. Kusuma, N. (2022). Indonesian youth launched Y20 Indonesia 2022 white paper. *Green Network Asia*. Diakses dari <https://greennetwork.asia/news/indonesian-youth-launched-y20-indonesia-2022-white-paper/>
- Melissen, J. (Ed.). (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (edisi ke-3)*. Sage.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- Todd, K. (2025, November 30). *Diplomacy, drama and no communiqué: Making sense of the Y20 2025*. Young Australians in International Affairs. <https://www.youngausint.org.au/post/diplomacy-drama-and-no-communiqu%C3%A9-making-sense-of-the-y20-2025>
- UNESCO. (2024, June 19). Youth 20 interagency meeting in Brazil: Proposals and challenges for a sustainable and inclusive future. <https://www.unesco.org/en/articles/youth-20-interagency-meeting-brazil-proposals-and-challenges-sustainable-and-inclusive-future>.
- United Nations. (n.d.). Frequently asked questions. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/faq.html>.

- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). Resolusi Dewan Keamanan 2250 (2015) tentang Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427-460.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: The anatomy of an institution. *International Organization*, 46(3), 561-598.
- Scholte, J. A. (Ed.). (2011). *Building Global Democracy? Civil Society and Accountable Global Governance*. Cambridge University Press.
- Tallberg, J., Sommerer, T., Squatrito, T., & Jonsson, C. (2013). *The Opening Up of International Organizations: Transnational Access in Global Governance*. Cambridge University Press.
- The Jakarta Post. (2022, 4 Agustus). G20 youth: Give us a seat at G20 Bali Summit [Opini]. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/08/04/g20-youth-give-us-a-seat-at-g20-bali-summit>.
- Wijaya, A. (2022, 13 Juli). Y20 Indonesia: Promoting the youth agenda at the G20. The Jakarta Post. Diakses dari <https://newgelora.thejakartapost.com/opinion/2022/07/13/y20-indonesia-promoting-the-youth-agenda-at-the-g20>.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (edisi ke-6). Sage.
- Young Diplomats of Canada. (2026). G20 Youth Summit (Y20). Diakses dari <https://youngdiplomats.ca/youth20>.